

MEMBANGUN KESADARAN KEPEMIMPINAN NASIONAL TERHADAP “SADAR BERNEGARA” DI SUKABUMI

Denny Andreas¹, Sharon Evangelica², Venisia Censia Saijuna³

¹⁻³Sekolah Tinggi Teologi Baptis Kalvari

E-mail: denny.andreas@sttbk.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji proyek keterlibatan masyarakat yang bertujuan untuk mengembangkan kepemimpinan melalui konsep “Sadar Bernegara” (kesadaran nasional) di Sukabumi, Indonesia. Proyek ini berfokus pada pemberdayaan pemimpin lokal melalui pelatihan kepemimpinan, penyelenggaraan seminar, dan fasilitasi dialog kolaboratif antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemimpin agama dan masyarakat, perwakilan pemerintah, dan kelompok pemuda. Tujuan utama proyek ini adalah meningkatkan pemahaman peserta tentang persatuan nasional, nilai-nilai demokrasi, dan kohesi sosial dalam masyarakat multikultural. Dengan mengevaluasi hasil proyek, studi ini menilai efektivitasnya dalam membangun keterampilan kepemimpinan yang mempromosikan inklusivitas dan solidaritas nasional. Metode evaluasi meliputi survei, wawancara, dan observasi, memungkinkan analisis komprehensif tentang dampak program. Temuan menunjukkan bahwa proyek ini berhasil meningkatkan kesadaran peserta tentang peran mereka sebagai warga negara dan pemimpin, serta dilengkapi dengan kemampuan untuk menjembatani perbedaan sosial. Studi ini juga mengeksplorasi implikasi yang lebih luas dari inisiatif semacam ini untuk pelatihan kepemimpinan di Indonesia, menekankan pentingnya kepemimpinan inklusif yang mendukung harmoni sosial, dan partisipasi demokratis dalam negara yang beragam.

Kata Kunci: Pengembangan Kepemimpinan, Sadar Bernegara, Partisipasi Masyarakat, Nilai-Nilai Demokrasi, Sukabumi, Kohesi Sosial.

ABSTRACT

This research examines a community engagement project that aimed to develop leadership through the concept of “Sadar Bernegara” (national awareness) in Sukabumi, Indonesia. The project focused on empowering local leaders through leadership training, organizing seminars, and facilitating collaborative dialogue between various stakeholders, including religious and community leaders, government representatives, and youth groups. The main objective of the project was to increase participants' understanding of national unity, democratic values, and social cohesion in a multicultural society. By evaluating the project's outcomes, the study assessed its effectiveness in building leadership skills that promote inclusiveness and national solidarity. Evaluation methods include surveys, interviews, and observations, allowing for a comprehensive analysis of the program's impact. Findings show that the project successfully raised participants' awareness of their roles as citizens and leaders, and equipped them with the ability to bridge social differences. The study also explores the broader implications of this kind of initiative for leadership training in Indonesia, emphasizing the importance of inclusive leadership that supports social harmony, and democratic participation in a diverse country.

Keywords: Leadership Development, Civic Awareness, Community Participation, Democratic Values, Sukabumi, Social Cohesion.

PENDAHULUAN

Struktur sosial-budaya yang kompleks di Indonesia menuntut bentuk pengembangan kepemimpinan yang kuat, yang tidak hanya fokus pada pengembangan keterampilan teknis, tetapi juga menanamkan rasa tanggung jawab, atau sadar bernegara. Selama beberapa dekade terakhir, perhatian terhadap pengembangan kepemimpinan di Indonesia semakin meningkat sebagai isu yang lebih kompleks yang memerlukan integrasi identitas nasional, komunitas, dan nilai-nilai moral (Mahpudz, 2023; Candra et al., 2021). Di wilayah Sukabumi, terdapat kebutuhan mendesak akan pemimpin yang cakap dalam menyelesaikan masalah lokal sambil tetap mengedepankan rasa identitas nasional. Hal ini

penting karena Indonesia ditandai oleh pluralisme yang meluas, di mana integrasi antara orang-orang dari berbagai budaya, etnis, dan latar belakang sosio-ekonomi sangat krusial untuk mendorong pembangunan berkelanjutan dan kohesi sosial (Candra et al., 2021).

Istilah “sadar bernegara” merujuk pada kesadaran akan hak dan kewajiban warga negara yang memupuk rasa identitas terhadap negara mereka (Candra, et al, 2021). Dengan memperluas semangat ini, inisiatif komunitas dapat melatih generasi baru pemimpin yang berkomitmen pada kohesi sosial dan formulasi kebijakan serta tindakan yang bermanfaat bagi semua secara sosial. Bukti menunjukkan bahwa program yang berfokus pada kepemimpinan dan keterlibatan komunitas dengan penekanan yang memadai pada pembentukan kepercayaan dan tata kelola partisipatif memiliki dampak yang signifikan pada modal sosial dan kesejahteraan kolektif (Orazani et al, 2023; Porr, 2011). Hal ini sangat penting di Sukabumi, mengingat atribut historis, geografis, dan budaya yang luar biasa, yang membuatnya esensial untuk merancang pendekatan kepemimpinan yang terintegrasi dengan identitas nasional dan konteks lokal (Cleveland & Cleveland, 2018).

Tujuan studi ini sebagai berikut: Pertama, mengevaluasi dampak inisiatif berbasis komunitas yang bertujuan menumbuhkan dan memperkuat kesadaran kepemimpinan nasional (sadar bernegara) di kalangan masyarakat. Kedua, memahami bagaimana inisiatif ini memperkuat kohesi sosial dengan mengumpulkan orang-orang dari berbagai latar belakang di Sukabumi. Studi ini mengadopsi asumsi yang menyatakan bahwa pendekatan pendidikan kepemimpinan yang berfokus pada identitas nasional, keterlibatan komunitas, dan partisipasi warga menghasilkan komunitas yang lebih kuat, tangguh, dan aktif secara sosial (Mahpudz, 2023; Orazani et al., 2023; Porr, 2011). Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk berkontribusi pada literatur tentang pengembangan kepemimpinan di Indonesia dengan mendokumentasikan proses dan pendekatan yang dapat berguna dalam mengatasi fragmentasi komunitas dan membangun masyarakat nasional yang kohesif.

METODE PELAKSANAAN

Penelitian ini menggunakan desain campuran (*mixed-methods*) untuk mengevaluasi proyek keterlibatan komunitas yang berfokus pada partisipasi kepemimpinan melalui konsep sadar bernegara (kesadaran nasional) di Sukabumi, Indonesia. Desain ini menggabungkan metode kualitatif dan kuantitatif untuk menilai pencapaian tujuan proyek terkait kesadaran peserta tentang kepemimpinan, identitas nasional, dan integrasi sosial, yang merupakan perubahan dalam tingkat kesadaran peserta. Tim multidisiplin yang terdiri dari pendidik dan praktisi dari Sekolah Tinggi Teologi Baptist Kalvari (STTBK) bekerja sama dengan kelompok agama dan masyarakat lokal untuk melaksanakan proyek ini.

Desain Proyek

Proyek keterlibatan masyarakat “Membangun Pemimpin Bangsa: Sadar Bernegara” dilaksanakan dalam *workshop* selama tiga hari pada Oktober 2024. Proyek ini terdiri dari kegiatan pendidikan dan partisipatif yang terkoordinasi dan terstruktur, bertujuan untuk mengembangkan

potensi kepemimpinan serta menumbuhkan kewarganegaraan aktif peserta. Proyek ini mencakup komponen-komponen berikut:

- a. Seminar dan dialog pleno: diselenggarakan dan difokuskan pada isu-isu kepemimpinan nasional, nilai-nilai demokrasi, identitas dan keragaman di Indonesia, serta teologi pembangunan bangsa.
- b. Sesi pelatihan kepemimpinan: mencakup branding diri strategis, komunikasi persuasif, dan kepemimpinan etis.
- c. *Workshop* dan diskusi kasus: sesi partisipatif, di mana peserta secara aktif terlibat untuk mengidentifikasi tantangan kepemimpinan di komunitas mereka dan mengembangkan solusi lokal yang layak.
- d. Persahabatan komunitas dan dialog antaragama: menciptakan kesempatan interaksi informal antara pemimpin agama, masyarakat, dan akademisi untuk mempromosikan kepercayaan dan pemahaman.
- e. Sesi perencanaan dan evaluasi lanjutan: peserta didorong untuk mengidentifikasi tindakan kepemimpinan yang sesuai dengan konteks lokal mereka.

Kegiatan ini didasarkan pada prinsip-prinsip pendidikan dewasa dan pembelajaran transformatif, dengan fokus pada pembelajaran pengalaman, refleksi kritis, dan tanggung jawab warga.

Pengumpulan Data

Untuk mengukur efektivitas dan dampak proyek, pendekatan multidisiplin dengan metode kualitatif dan kuantitatif digunakan:

- a. Survei pra dan pasca acara: diberikan kepada semua peserta untuk mengukur pengetahuan, sikap, dan tingkat kepemimpinan mereka terkait nasionalisme, partisipasi demokratis, dan partisipasi komunitas. Survei pasca acara juga mencakup pertanyaan terkait kepuasan dan hasil yang dirasakan.
- b. Wawancara semi-struktur: dilakukan dengan sampel *purposive* sebanyak 12 peserta berbasis komunitas, migran agama, dan pemimpin pemuda. Wawancara ini menangkap evaluasi peserta terhadap pelatihan, termasuk perubahan perspektif mereka dan cara mereka akan menerapkan pelatihan dalam konteks mereka.
- c. Pengamatan langsung: dengan pendekatan etnografis, peneliti menghadiri sesi untuk mendokumentasikan interaksi peserta, perilaku kelompok, dan tanda-tanda non-verbal pembelajaran dan kerja sama tim. Catatan observasi dianalisis secara tematik untuk mengonfirmasi data yang dilaporkan sendiri.
- d. Analisis dokumen: dokumen *workshop* yang mencatat hasil dan output dari sesi pemetaan, ringkasan kelompok, dan komitmen diketik dan disortir untuk memetakan kemunculan kepemimpinan dan strategi yang didorong oleh komunitas.
- e. Penemuan perubahan individu dan kolektif dimungkinkan melalui triangulasi data, yang memungkinkan pemahaman tentang keandalan dan validitas wawasan yang muncul.

Peserta

- a. Seluruh peserta dari wilayah Sukabumi diintegrasikan ke dalam program. Pemilihan peserta dilakukan bekerja sama dengan pusat-pusat masyarakat, pendidikan, dan gereja lokal untuk menangkap semua strata demografis yang tersedia.
- b. Pemimpin agama lokal (25%): kelompok ini terdiri dari tokoh masyarakat lokal seperti pendeta dan pekerja antaragama dari Badan Kerjasama Gereja-Gereja Sukabumi.
- c. Pemuda dan mahasiswa (30%): mayoritas terdiri dari mahasiswa teologi dan pendidikan agama tingkat sarjana dan pascasarjana, serta pemimpin pemuda aktif dari gereja-gereja lokal.
- d. Pemimpin dan aktivis masyarakat (20%): pimpinan organisasi non-pemerintah (NGO) dan masyarakat sipil yang berurusan dengan pendidikan dan penyuluhan publik, serta hubungan dengan warga.
- e. Pendidik dan tenaga akademik (15%): anggota akademis dan administratif dari perguruan tinggi teologi dan universitas afiliasi membentuk mayoritas tenaga pengajar.
- f. Perwakilan pemerintah dan pemangku kepentingan (10%): pihak pemerintah atau administratif lokal seperti Kesbangpol (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik) dan FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama).

Kelompok peserta dirancang secara sengaja untuk mencerminkan keragaman sosial-religius Indonesia, dengan memperhatikan keseimbangan antara laki-laki dan perempuan, serta berbagai generasi. Komposisi ini sangat berguna untuk debat tentang pluralisme, kebangsaan, dan kepemimpinan moral. Pendekatan ini diambil untuk memenuhi tidak hanya tujuan pengukuran perubahan kognitif dan sikap, tetapi juga untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana peserta menginternalisasi dan mengimplementasikan nilai-nilai sadar bernegara. Analisis terhadap pendekatan pendidikan kepemimpinan dan kohesi sosial dalam konteks pluralistik di tingkat komunitas terkait dengan kebijakan sadar bernegara secara alami mengarah pada temuan dari metodologi ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kerangka Teoretis

Kerangka teoretis studi tentang pengembangan kepemimpinan nasional melalui inisiatif sadar bernegara berfokus pada dua dimensi yang saling terkait: kepemimpinan dan kebangsaan serta kohesi sosial dan inklusi. Kerangka ini dikembangkan untuk menanggapi isu-isu yang muncul dari masyarakat multikultural dengan keragaman etnis, agama, dan budaya yang perlu disatukan melalui prinsip-prinsip kepemimpinan yang kuat dan unifikasi.

Kepemimpinan dan Kebangsaan

Pertimbangan nasionalisme dan inklusi dalam teori kepemimpinan sangat penting dalam konteks Indonesia. Seperti yang dinyatakan oleh Wang et al. (2020), kepemimpinan transformasional

sangat vital karena memungkinkan pemimpin untuk menginspirasi, memobilisasi pengikut, dan melibatkan mereka dalam mencapai nilai dan tujuan bersama. Pemimpin transformasional adalah agen perubahan yang memiliki kemampuan untuk menumbuhkan identitas nasional yang akomodatif terhadap berbagai budaya dan memberikan rasa identitas kepada banyak orang. Seperti yang dianalisis oleh Zeng et al. (2020), kepemimpinan inklusif, yang berasal dari teori identitas sosial, berfokus pada pengakuan dan penghargaan terhadap berbagai kategori di tingkat kepemimpinan dan diterapkan dalam organisasi. Pemimpin inklusif, oleh karena itu, membantu meningkatkan loyalitas dan dedikasi pengikut terhadap tujuan organisasi dengan memperhatikan isu-isu lunak seperti representasi dan kelompok marjinal, sambil memperkuat nasionalisme dalam masyarakat multikultural dan multi-etnis.

Teori multikulturalisme berguna untuk menjelaskan kepemimpinan di Indonesia karena negara ini memiliki keragaman budaya yang kaya. Hal ini berarti bahwa apresiasi dan akomodasi terhadap perbedaan budaya, ras, dan etnis diperlukan agar masyarakat dapat menikmati harmoni sosial, integrasi sosial, dan inklusi (Sariyatun & Marpelina, 2024). Penghargaan ini juga mendukung integrasi politik yang berfokus pada penekanan pada kewarganegaraan bersama dan identitas warga sebagai penyatu yang mendorong praktik-praktik pemimpin yang menuntut keadilan, kesetaraan dalam kesempatan, inklusi, advokasi, dan ketidakhadiran diskriminasi (Wang et al., 2024). Santamaría mencatat bahwa:

Mengadopsi pendekatan kepemimpinan yang beragam secara multikultural dapat mengubah hubungan kekuasaan yang sudah mapan dan mendorong perubahan sosial, yang sangat penting dalam menumbuhkan rasa kebangsaan yang bersatu di antara kelompok-kelompok yang beragam (Santamaría, 2013).

Kohesi Sosial dan Inklusi

Teori-teori sosial tentang kohesi sosial menggambarkan dampak kepemimpinan yang efektif dalam mengatasi perpecahan budaya dan etnis di Indonesia. Breidahl et al. (2017) mencatat bahwa kohesi secara prinsip terkait erat dengan norma-norma bersama yang mendasari suatu masyarakat. Telah dibuktikan bahwa nilai-nilai bersama memfasilitasi kepercayaan dan solidaritas bahkan di antara kelompok yang beragam, menantang asumsi pesimistis bahwa kebijakan multikultural akan menyebabkan fragmentasi (Breidahl et al., 2017). Dalam hal ini, nilai-nilai bersama yang harus ditanamkan dalam masyarakat multikultural adalah nilai-nilai yang melampaui perbedaan budaya, sehingga menegaskan inklusi dan apresiasi terhadap keragaman (Sariyatun & Marpelina, 2024).

Selain itu, teori-teori tentang kepemimpinan kolaboratif dan distributif menekankan partisipasi komunitas sebagai sarana kohesi sosial. Model-model ini mendukung sistem tata kelola di mana pemimpin bertindak sebagai fasilitator dalam percakapan yang menangkap berbagai perspektif dalam masyarakat dan mengembangkan kebijakan serta inisiatif bersama pemangku kepentingan terkait (Sönmez & Gökmenoğlu, 2022). Partisipasi semacam ini meningkatkan hubungan sosial di dalam komunitas dan memperkuat tekad untuk menjembatani perbedaan budaya. Seperti yang dicatat dalam konteks pendidikan, mereka yang menganut kerangka kerja keadilan sosial cenderung membangun

sistem yang mencerminkan serta merayakan inklusi dan keragaman serta mensistematisasi perubahan sosial (Brooks et al., 2017).

Untuk menyimpulkan, batasan studi kasus ini menggunakan satu teori yang berpusat pada kepemimpinan inklusif dan kohesi sosial dalam kerangka identitas nasional Indonesia yang multikultural. Pemimpin yang hebat harus menyeimbangkan realitas keragaman budaya dengan kebutuhan akan identitas bersama dan inklusi, sehingga mengintegrasikan masyarakat mereka dengan narasi yang utuh dan menghormati tentang bangsa.

Tinjauan Literatur

1. Perkembangan Kepemimpinan Indonesia

Telah terjadi peningkatan yang signifikan dalam karya-karya akademik yang fokus pada Indonesia multikultural, terutama terkait inklusivitas dan persatuan sebagai area perhatian. Para peneliti telah memberikan perhatian khusus pada kepemimpinan sebagai salah satu faktor utama yang dapat mengatasi masalah multikultural Indonesia (Eagly & Chin, 2010). Kontribusi utama yang dibahas dalam literatur adalah inklusivitas kepemimpinan sebagai faktor yang dapat mempromosikan sinergi dalam komunitas yang beragam. Eagly dan Chin (2010) menyoroti bahwa teori kepemimpinan modern perlu memperhitungkan identitas beragam yang ada di Indonesia dan mengintegrasikan kerangka kerja yang lebih inklusif.

Selain itu, studi yang dilakukan oleh Rahmiani dkk. (2022) menjelaskan bahwa kebanyakan program kepemimpinan di Indonesia perlu mengintegrasikan inklusivitas dan multikulturalisme untuk memupuk kepercayaan dan kolaborasi di antara kelompok etnis dan agama yang beragam di Indonesia. Peran komunitas dalam program kepemimpinan juga ditekankan sebagai hal yang penting oleh Hadikusuma dkk. (Hui dkk., 2021), yang menyatakan bahwa kegiatan sekolah yang dirancang untuk menumbuhkan identitas politik suatu bangsa sangat berkontribusi pada integrasi sosial dan identitas bersama di kalangan pemuda Indonesia. Meskipun telah banyak upaya, dampak strategi ini terhadap rasa persatuan nasional yang berkelanjutan tetap menjadi tantangan.

2. Perspektif Perbandingan Internasional

Dengan mengkaji isu ini secara global, para akademisi dari negara-negara multikultural lain dapat memberikan wawasan berharga melalui studi perbandingan yang memandang hubungan antarbudaya sebagai disiplin ilmu. Misalnya, Keddie (2012) menyoroti bagaimana Australia berusaha memperkuat kohesi sosial melalui kebijakan multikultural yang bertujuan memperkuat hubungan komunitas, dengan fokus khusus pada penerimaan budaya dan partisipasi dalam dialog. Pendekatan ini, yang didasarkan pada pengakuan budaya yang terikat secara budaya daripada esensialisme, dapat berguna dalam menyelesaikan masalah Indonesia terkait pengembangan kepemimpinan.

Selain itu, Afrika Selatan merupakan contoh negara yang melaksanakan program jangkauan sosial untuk mempromosikan harmoni sosial di antara kelompok-kelompok beragam, menunjukkan kebutuhan akan integrasi pendekatan tata kelola untuk menyelesaikan masalah lokal (Ng'eno, 2023).

Negara-negara ini secara strategis menerapkan pendekatan yang mendorong persatuan pada skala nasional dengan mendorong orang dari berbagai lapisan sosial untuk berpartisipasi aktif dalam tata kelola (Ng'eno, 2023).

Pentingnya pendekatan yang berfokus pada kepemimpinan bersama dan upaya kolaboratif didasarkan pada temuan Gotsis dan Grimani (Gotsis & Grimani, 2016), yang menunjukkan bahwa desain kepemimpinan yang fleksibel diperlukan untuk mempromosikan kohesi dalam konteks yang berbeda. Namun, dengan wawasan tersebut, terdapat kesenjangan yang mencolok dalam literatur komparatif yang ada mengenai dampak inisiatif semacam itu dalam kasus khusus Indonesia, menunjuk pada kebutuhan untuk menerapkan model-model ini dalam penelitian yang lebih mendalam.

3. Menganalisis Kelemahan dalam Studi yang Ada

Studi tentang pengembangan kepemimpinan di Indonesia merupakan bagian literatur dari negara-negara multikultural lainnya. Namun, masih terdapat celah yang ingin diatasi oleh studi ini. Pertama, sedikit penelitian yang dilakukan tentang hasil konkret yang dihasilkan oleh program komunitas yang bertujuan meningkatkan kesadaran kepemimpinan, terutama dari perspektif konteks sosiobudaya Sukabumi. Studi ini bertujuan untuk mengisi celah tersebut dengan menentukan dampak inisiatif sadar bernegara dalam memupuk kohesi sosial.

Selain itu, studi yang dilakukan pada topik ini cenderung kurang memiliki kerangka kerja yang kuat untuk mengukur efektivitas program kepemimpinan yang dirancang untuk mencapai dan memupuk integrasi sosial, kesatuan nasional, dan inklusivitas secara berkelanjutan. Studi ini bertujuan untuk meninjau pendekatan dan hasil penelitian yang ada secara sistematis, mengevaluasi relevansinya dengan Indonesia, dan membantu pengembangan kebijakan peningkatan kepemimpinan yang efektif. Akhirnya, meskipun terdapat peningkatan minat global terhadap teori kepemimpinan inklusif, masih banyak yang perlu dilakukan dalam mempelajari konsep-konsep ini melalui lensa Indonesia untuk menentukan peran budaya dalam penerapan kepemimpinan inklusif.

Bagian ini merangkum temuan dari analisis berbagai sumber data mengenai program kepemimpinan “Membangun Pemimpin Bangsa: Sadar Bernegara” yang dilaksanakan di Sukabumi, Indonesia. Informasi difokuskan pada tiga aspek utama: (1) dampak terhadap peserta, (2) wawasan dan tantangan implementasi, dan (3) evaluasi dibandingkan dengan program serupa dari berbagai belahan dunia dengan komponen multikultural.

Dampak terhadap Peserta

Program ini tampaknya memiliki dampak yang signifikan dan beragam pada peserta, sebagaimana terlihat dari data kuantitatif dan kualitatif. Data survei pra dan pasca acara menunjukkan bahwa 87% responden mengakui adanya peningkatan pemahaman terhadap prinsip-prinsip sadar bernegara, terutama terkait tanggung jawab warga negara dan identitas nasional dalam kerangka kepemimpinan. Selain itu, peserta menunjukkan apresiasi yang lebih besar terhadap peran pribadi

mereka sebagai pemimpin dalam mempromosikan kohesi sosial, pluralisme, dan inklusivitas kewarganegaraan.

Hasil berbasis keterampilan juga menunjukkan bahwa 72% peserta melaporkan peningkatan rasa percaya diri dalam berbagai keterampilan kepemimpinan, termasuk visi strategis, hubungan publik, dan sensitivitas konflik. *Workshop* desain berpikir dan pidato persuasif khususnya disebutkan, dengan beberapa peserta menyatakan sesi ini memungkinkan mereka mengembangkan rencana aksi komunitas yang selaras dengan idealisme demokratis dan pluralis.

Wawancara kualitatif mendukung temuan ini, dengan banyak peserta mencatat transisi dari memandang kepemimpinan sebagai fenomena kelompok yang sempit menjadi menyadari bahwa kepemimpinan adalah urusan nasional yang integratif. Seorang pemimpin muda lokal menggambarkan perubahan ini dalam pernyataan berikut:

“Sebelum pelatihan ini, saya berpikir kepemimpinan hanya tentang mengorganisir acara untuk kelompok kami. Secara pribadi, sekarang saya memahami bahwa kepemimpinan adalah berpikir untuk seluruh komunitas, Indonesia, dan mendengarkan mereka yang berbeda dari kita.”

Dalam konteks di mana fragmentasi sosial akibat perbedaan etnis, agama, atau politik prevalen, perubahan ini penting. Proyek ini berhasil memberdayakan peserta tidak hanya dengan keterampilan teknis, tetapi juga doktrin etis dan kewarganegaraan tentang kepemimpinan yang bertanggung jawab dalam demokrasi.



Gambar 1. Foto Bersama Peserta Kegiatan



Gambar 2. Penyampaian Materi



Gambar 3. Foto Bersama Peserta

Tantangan dan Wawasan

Program ini berhasil dalam beberapa aspek; namun, pada saat yang sama, terdapat beberapa tantangan signifikan selama implementasi. Pertama, polarisasi politik muncul dalam diskusi kelompok yang dianalisis mengenai kepemimpinan nasional dan akuntabilitas demokratis kepemimpinan tersebut. Diketahui bahwa peserta kadang-kadang memegang pandangan yang bertentangan secara kuat dan saling bertentangan. Untuk mengatasi tantangan ini, fasilitator menetapkan pedoman yang jelas mengenai percakapan yang menghormati dan menggunakan strategi pengajaran berbasis kasus untuk mengurangi personalisasi isu-isu kontroversial.

Masalah kedua adalah tingkat partisipasi yang tidak merata di antara kelompok. Beberapa pemimpin komunitas yang lebih tua, misalnya, tampak enggan terlibat dengan konsep seperti “pemerintahan inklusif” dan “*design thinking*,” sementara peserta muda lebih terbuka terhadap kemungkinan dan berpartisipasi aktif dalam *workshop*. Strategi pemasangan antar generasi yang diterapkan oleh tim proyek mengatasi tantangan ini dengan menempatkan peserta muda dalam peran *co-leader* bersama peserta yang lebih senior untuk mendorong saling menghormati, belajar, dan mentoring.

Beberapa kendala logistik menimbulkan tantangan minor seperti keterbatasan ruang dan tempat, alokasi waktu dalam sesi, serta masalah teknis terkait peralatan presentasi. Tantangan ini diatasi melalui penjadwalan sesi yang fleksibel, interaksi informal selama dan setelah ruang dialog formal yang telah ditentukan, penyampaian konten, dan dialog informal yang kaya. Pemimpin lokal yang berpartisipasi dalam sesi sebagai *co-facilitator* memiliki dampak besar, karena pengetahuan mereka tentang sumber daya komunitas sangat berharga bagi peserta. Memberikan peserta fasilitator komunitas lokal yang dihormati tampaknya sangat efektif, menunjukkan bahwa keterlibatan kemungkinan besar ditingkatkan oleh pemahaman tentang budaya dan konteks lokal yang dominan.

Analisis Perbandingan

Dibandingkan dengan masyarakat multikultural lain, program Sukabumi menunjukkan dinamika kontekstual yang unik dan kesamaan yang menonjol dalam inisiatif pengembangan kepemimpinan.

Program kepemimpinan inklusif berfokus pada partisipasi multikultural dan pengurangan hambatan sistemik terhadap akses dan keadilan. Program Sukabumi bertujuan untuk menumbuhkan pemikiran inklusif, tetapi berpusat pada kerangka Pancasila dan teologi, bukan kritik institusional atau advokasi kebijakan. Pergeseran ini menyoroti pentingnya narasi moral dan spiritual dalam diskursus kepemimpinan Indonesia, terutama dalam organisasi berbasis agama.

Program kepemimpinan pasca-*apartheid* di Afrika Selatan berfokus pada rekonsiliasi dan penyembuhan trauma historis (Mbembe, 2015). Program Sukabumi tidak berasal dari konteks konflik, tetapi menghadapi perpecahan etnis dan ideologis. Fokus pada sadar bernegara menyediakan identitas nasional yang mempersatukan, mirip dengan fokus Afrika Selatan pada Ubuntu, di mana memupuk

inklusivitas etis dalam kepemimpinan menjadi prinsip panduan. Yang membuat program Sukabumi unik adalah kombinasi pendidikan teologi dengan keterlibatan sipil, suatu perpaduan yang jarang ditemukan dalam pendidikan kepemimpinan Barat. Dengan menempatkan pendidikan kepemimpinan dalam teologi Kristen bersama kerangka demokratis dan nasionalis, program ini melahirkan perpaduan unik antara iman, nasionalisme, dan pluralisme.

KESIMPULAN

Program ini berhasil meningkatkan keterampilan kepemimpinan peserta serta memperkuat pemahaman mereka terhadap identitas nasional melalui pendekatan pendidikan kewarganegaraan berbasis nilai. Peserta menunjukkan kesiapan yang lebih tinggi untuk terlibat dalam aktivitas demokratis, serta kemampuan untuk memimpin dan bertindak dalam isu-isu komunitas secara inklusif. Melalui pelatihan yang dirancang secara bertahap dan kontekstual, peserta mampu menguasai keterampilan penting seperti analisis situasi, dinamika kelompok, dan dialog lintas latar belakang. Pendekatan ini juga berhasil mengatasi tantangan seperti kesenjangan usia dan perbedaan pandangan politik dengan teknik fasilitasi adaptif yang sensitif terhadap kondisi sosial budaya lokal.

Integrasi nilai-nilai agama ke dalam pendidikan kewarganegaraan terbukti efektif dalam membentuk pemimpin yang bertanggung jawab secara moral dan memiliki kesadaran multikultural. Program ini tidak hanya berdampak pada individu peserta, tetapi juga memberikan kontribusi terhadap penguatan etos demokrasi dan tata kelola yang inklusif di masyarakat pluralistik seperti Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model kepemimpinan berbasis nilai sosial dan identitas nasional dapat menjadi strategi yang relevan untuk mengatasi kurangnya pluralisme, inklusivitas, dan kepemimpinan nasional yang berkarakter dalam konteks keberagaman agama, etnis, dan politik.

Saran untuk Program Masa Depan

- a. Mengembangkan pendekatan berbasis komunitas dalam pelatihan kepemimpinan di perguruan tinggi teologi, universitas, dan organisasi masyarakat sipil yang mengintegrasikan ajaran agama ke dalam partisipasi warga. Memperkenalkan dialog antaragama dan antargenerasi ke dalam kerangka kerja kepemimpinan untuk mengatasi perbedaan budaya dan ideologis.
- b. Menciptakan bimbingan berkelanjutan disertai dengan kegiatan tindak lanjut yang konsisten untuk mempertahankan minat peserta dan mendorong penerapan keterampilan kepemimpinan yang diperoleh dalam situasi praktis.
- c. Mendistribusikan sumber daya pelatihan kepemimpinan melalui media digital untuk meningkatkan aksesibilitas dan mendorong keterlibatan berkelanjutan dengan materi di luar sesi pelatihan formal.
- d. Bekerja sama dengan otoritas lokal serta lembaga nasional untuk mengintegrasikan kegiatan kepemimpinan akar rumput ke dalam kebijakan komunitas yang lebih luas mengenai integrasi nasional dan kohesi sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Breidahl, K., Holtug, N., & Kongshøj, K. (2017). Do shared values promote social cohesion? If so, which? Evidence from Denmark. *European Political Science Review*, 10(1), 97–118. <https://doi.org/10.1017/s1755773916000266>
- Brooks, J., Normore, A., & Wilkinson, J. (2017). School leadership, social justice, and immigration. *International Journal of Educational Management*, 31(5), 679–690. <https://doi.org/10.1108/ijem-12-2016-0263>
- Candra, A., Suryadi, K., Rahmat, R., & Nurbayani, S. (2021). Digital citizenship infrastructure to foster the reinforcement of national identity in Indonesia. *Kultura-Spoleczeństwo-Edukacja*, 19(1), 37–50. <https://doi.org/10.14746/kse.2021.19.3>
- Cleveland, M., & Cleveland, S. (2018). Building engaged communities: A collaborative leadership approach. *Smart Cities*, 1(1), 155–162. <https://doi.org/10.3390/smartcities1010009>
- Eagly, A., & Chin, J. (2010). Diversity and leadership in a changing world. *American Psychologist*, 65(3), 216–224. <https://doi.org/10.1037/a0018957>
- Gotsis, G., & Grimani, A. (2016). Diversity as an aspect of effective leadership: Integrating and moving forward. *Leadership & Organization Development Journal*, 37(2), 241–264. <https://doi.org/10.1108/lodj-06-2014-0107>
- Hui, C., Liang, Q., Feng, C., & Zhang, Y. (2021). Leadership and follower voice: The role of inclusive leadership and group faultlines in promoting collective voice behavior. *The Journal of Applied Behavioral Science*, 59(1), 61–87. <https://doi.org/10.1177/00218863211035243>
- Keddie, A. (2012). Australian multicultural policy: Social cohesion through a political conception of autonomy. *Journal of Sociology*, 50(4), 408–421. <https://doi.org/10.1177/1440783312462166>
- Mahpudz, A. (2023). Developing global citizenship education materials and values in the Indonesian school curriculum. In *Proceedings of the 6th International Conference on Educational Development and Quality Assurance* (pp. 720–728). https://doi.org/10.2991/978-2-38476-096-1_76
- Marpelina, L. (2024). Exploring multiculturalism and intolerance: Understanding the dynamics of diversity. *Jurnal Pendidikan Multikultural Indonesia*, 6(2), 66–75. <https://doi.org/10.23887/jpmu.v6i2.64695>
- Ng'eno, G. (2023). National identity and cohesion in Kenya: A socio-political discourse. *European Journal of Conflict Management*, 3(2), 38–52. <https://doi.org/10.47672/ejcm.1659>
- Orazani, S., Reynolds, K., & Osborne, H. (2023). What works and why in interventions to strengthen social cohesion: A systematic review. *Journal of Applied Social Psychology*, 53(10), 938–995. <https://doi.org/10.1111/jasp.12990>
- Porr, D. (2011). Putting “development” back into community leadership (development) programs. *Community Development*, 42(1), 97–105. <https://doi.org/10.1080/15575330.2010.505295>
- Rahmiani, N., Binmudnee, P., & Ojuronbe, S. (2022). Post-pandemic social cohesiveness in English language learning: Actors’ capacity transformation. *Journal of English Language Teaching Innovations and Materials (JELTIM)*, 4(2), 172. <https://doi.org/10.26418/jeltim.v4i2.57786>
- Santamaría, L. (2013). Critical change for the greater good. *Educational Administration Quarterly*, 50(3), 347–391. <https://doi.org/10.1177/0013161x13505287>
- Sönmez, E., & Gökmenoğlu, T. (2022). The impact of principals’ distributed leadership behaviors on teachers’ attitudes toward multiculturalism: Social justice leadership as mediator. *Education and Urban Society*, 55(4), 433–462. <https://doi.org/10.1177/00131245221076095>
- Wang, D., Huang, L., Huang, X., Deng, M., & Zhang, W. (2024). Enhancing inclusive teaching in China: Examining the effects of principal transformational leadership, teachers’ inclusive role identity, and efficacy. *Behavioral Sciences*, 14(3), 175. <https://doi.org/10.3390/bs14030175>
- Wang, Q., Wang, J., Xiaohu, Z., Li, F., & Wang, M. (2020). How inclusive leadership enhances follower taking charge: The mediating role of affective commitment and the moderating role of traditionality. *Psychology Research and Behavior Management*, 13, 1103–1114. <https://doi.org/10.2147/prbm.s280911>

Zeng, H., Zhao, L., & Zhao, Y. (2020). Inclusive leadership and taking-charge behavior: Roles of psychological safety and thriving at work. *Frontiers in Psychology, 11*.
<https://doi.org/10.3389/fpsyg.2020.00062>